

DISERTASI
EKOLOGI POLITIK SOLUSI LINGKUNGAN DI INDONESIA:
AKTOR, KEPENTINGAN DAN RELASI KUASA

*THE POLITICAL ECOLOGY OF ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS IN INDONESIA: ACTORS, INTERESTS, AND
POWER RELATIONS*

KARNO BAHARUDDIN BATIRAN
M013201001



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN PENGAJUAN

**EKOLOGI POLITIK SOLUSI LINGKUNGAN DI INDONESIA: AKTOR,
KEPENTINGAN DAN RELASI KUASA**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

KARNO BAHARUDDIN BATIRAN

kepada

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

DISERTASI

EKOLOGI POLITIK LINGKUNGAN DI INDONESIA: AKTOR, KEPENTINGAN
DAN RELASI KUASA

KARNO BAHARUDDIN BATIRAN
M013201001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 14 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor

Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Ko-Promotor

Ko-Promotor

Micah Radandima Fisher, Ph.D

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Lambert Johan Verheijen, Ph.D

Dekan Fakultas Kehutanan Unhas,



Dr. A. Mujtahid M., S.Hut., MP.
NIP. 19690208 199702 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, disertasi berjudul "EKOLOGI POLITIK SOLUSI LINGKUNGAN DI INDONESIA: AKTOR, KEPENTINGAN DAN RELASI KUASA" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si sebagai Promotor dan Micah Fisher, Ph.D sebagai Ko-Promotor 1 serta Lambert Johan Verheijen, Ph.D sebagai Ko-Promotor 2. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka disertasi ini. Sebagian dari isi disertasi ini telah dipublikasikan di *Forest and Society*, 5(2), 619-630. sebagai *note from the field* dengan judul "Creating Commons: Reflections on Creating Natural Resource Management Regimes in South Sulawesi, Indonesia, *Forest and Society*, 7(2), 295-310. Sebagai *regular research article* dengan judul "Uprooting the Mosalaki: Changing institutions and livelihood impacts at Kelimutu National Park".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa disertasi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Januari 2024



Karno Baharuddin Batiran
NIM. M013201001

UCAPAN TERIMA KASIH

Ada banyak yang berkontribusi atas disertasi ini, individu-individu dan lembaga-lembaga, selama masa penelitian dan penulisan. Yang pertama kepada para penguji yang sudah menyediakan waktu untuk memberikan masukan bagi disertasi ini. Mereka adalah Prof. Dr. Yusran, Prof. Dr. Darmawan Salman, Prof. Dr. Supratman, dan Prof Maryudi PhD. Juga kepada Bapak Dr. Mujetahid., S.Hut, MP. Dekan Fakultas Kehutanan Unhas.

Kawan-kawan yang sudah membantu dalam proses penelitian lapangan di Berau dan Ende: Ahsan Setiawan, Syamsuddin G, Rahmat, Saleh Al Ali, Andhys, Fahri, Resa dan teman-teman LSM-LSM yang dengan senang hati meluangkan waktu untuk menemani berdiskusi dan bersedia diwawancara. Terima kasih juga buat Adi Al Ali, Musliadi dan Anto Antebis yang menyediakan dan mengolah data peta yang sangat saya butuhkan dalam penelitian saya. Haturan terima kasih juga saya berikan kepada warga desa yang sudah bersedia menjadi informan di desa-desa penelitian disertasi ini.

Kawan-kawan di Sekolah Rakyat Petani SRP PAYOPAYO dan Maros Youth Learning Center (MYLC) yang menyediakan ruang lapang untuk bercengkrama dan menjadi rumah tempat saya selalu kembali di tengah penat. Di sana saya bisa mengembalikan semangat, energi dan motivasi yang pada waktu waktu tertentu habis tergerus oleh berbagai masalah. Di sana ada Hawaluddin, Nuning, Reinaldi Maripi, Evi, Rahma, Ekki, Nita, Cobe, Musyrifa, Aty, semua teman-teman Batch 1, 2 dan 3 serta teman-teman MBKM MYLC Kehutanan Unhas dan PKL MYLC Agribisnis Unsulbar.

Kepada Komunitas Ininnawa, orang-orang yang bersama mereka saya tumbuh dan selama lebih dua puluh tahun telah menjadi keluarga, Ininnawalah yang membawa saya sampai sejauh ini. Untuk itu saya berterimakasih kepada Nurhady Sirimorok, Hasriadi Massalam, M. Aan Mansyur, Armin Hari, Asfriyanto, Anwar Jimpe Rachman, Mulyani Hasan, Fitriani, Rezki Wahid, Ekbes, Haliya, Sunardi Hawi (Almarhum), Rachmat Aris, Siswandi, Agung Prabowo, Tami, Hasnulir Nur, Randi Akbar, Eko Rusdiyanto, Ria, Selvy Anggraeni, Ibnul Hayat Tanrere, Mursyidin, Mega Haruna, Shany, Hendri Kulle. Terima kasih khusus juga kepada Accang, Tande, Ikbai S yang sudah setia menjadi teman serumah kemanapun kita pindah. Seluruh warga yang sudah menjadi keluarga bagi saya di Desa Tompobulu Pangkep, Desa Soga di Soppeng, Desa Kompang di Sinjai,

Kampung Long Ayap, Long Lamcin, dan Long Pelay di Berau. Dan banyak lagi kawan lain.

Terima kasih saya juga kepada keluarga lain di Forest and Society Research Group yang juga selalu menyediakan ruang yang nyaman dan menyenangkan untuk berdiskusi dan bercanda lalu meneliti: Vika Faradiba, Emban Mas'ud, Mita Andary, Irfan Saputra, Alfi, Nufadillah, Andi Kurniawan, Abdurrahman Abdullah, Munajat Nur Saputra, Halimah Larekeng, Nasri, Ilham Basmar, Ilham, Ramlah, Jumarliah. Kepada Fatwa Faturrahmat dan Nurlatipah Natsir untuk bantuannya mengumpulkan kepustakaan yang sangat memudahkan studi disertasi ini. Terima kasih khusus saya harus haturkan kepada Dadang Anugrah yang dalam waktu-waktu genting bersedia menolong yang akhirnya saya bisa fokus untuk penyelesaian disertasi ini.

Prof Alif K. Sahide pembimbing utama yang tanpa lelah dan tak kenal waktu memastikan saya bisa menyelesaikan disertasi dan studi ini, tanpa dedikasi yang diberikan khusus untuk studi saya, mustahil saya bisa menyelesaikannya. Micah Fisher, Ph.D pembimbing kedua yang dengan segala pandangan kritisnya ikut membentuk studi dan disertasi ini. Lambert Johan Verheijen, Ph.D pembimbing ketiga walaupun banyak keterbatasan karena berdomisili di Belanda masih selalu menyempatkan diri membantu sebisa mungkin.

Kepada Bapak Batiran, kakek yang dengan bangga namanya saya gunakan sebagai nama keluarga (nama akhir), Bapak Baharuddin Batiran dan Ibu Mutiara, orang tua saya, Suardi BA, Rosmeli, Nurdin Batiran, Saharuddin Batiran, Rosmiati, Nursyam, Murni, Nurdianti saudara-saudari saya yang dengan cara mereka masing-masing memastikan saya tetap bahagia. Juga kepada Bapak Suhardi dan Ibu Sunarti mertua saya juga dengan caranya sudah mendukung saya.

Yang terakhir kepada: Margareta Ita Novianti, Tadia Kibbutz Batiran, Ama Llulla Batiran, Isa Elbakyan Batiran, kalian bukanlah sistem pendukung bagi saya, kalian adalah sistem itu sendiri yang tidak mungkin saya melalui semua tanpanya.

Makassar, 20 Januari 2024

Penulis

Karno Baharuddin Batiran

ABSTRAK

KARNO BAHARUDDIN BATIRAN. **EKOLOGI POLITIK SOLUSI LINGKUNGAN DI INDONESIA: AKTOR, KEPENTINGAN DAN RELASI KUASA** (dibimbing oleh Muhammad Alif KS., Micah R. Fisher, dan Lambert Johan Verheijen)

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi sumber daya alam menjadi salah satu penyokong utama kemajuan ekonomi negara, di sisi lain menjadi pendorong utama eksploitasi lingkungan sampai ke tingkat yang menyebabkan kerusakan skala besar. Indonesia sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami kerusakan lingkungan yang sangat dramatis yang juga menyebabkan dampak besar bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Mulai dari deforestasi dan degradasi hutan, kehilangan keanekaragaman hayati sampai pada perubahan iklim. Untuk menangani persoalan-persoalan lingkungan tersebut kemudian muncul inisiatif-inisiatif solusi lingkungan. Solusi lingkungan adalah semua inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi dalam berbagai skema dan berbagai tingkatan, seperti proyek-proyek konservasi yang dilakukan oleh negara, solusi lingkungan yang diprakarsai oleh aktor-aktor di luar negara seperti Lembaga-lembaga donor internasional dan LSM-LSM, maupun inisiatif asli warga di tingkat tapak. Disertasi ini mengkaji bagaimana aktor, kepentingan dan relasi kuasa dalam setiap solusi-solusi lingkungan yang dilaksanakan, mengapa satu resep dijadikan sebagai solusi, mengapa satu solusi lingkungan dipilih ketimbang solusi lingkungan yang lain, bagaimana solusi lingkungan tersebut direncanakan, darimana datangnya ide solusi lingkungan tersebut, bagaimana diterapkan, bagaimana respon dan sikap warga di tingkat tapak terhadap solusi lingkungan tersebut, siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang menjadi korban, siapa yang tersingkir akibat dari solusi lingkungan tersebut dan apa dampak dari solusi lingkungan tersebut terhadap warga. Disertasi ini terdiri dari dua bagian kajian. Satu kajian yang mewakili solusi lingkungan berbasis ekonomi pasar (*market based solution*) yaitu studi kasus terhadap proyek bantuan internasional lingkungan skema REDD+ yang dilaksanakan di Kabupaten Berau dan satu kajian terhadap solusi lingkungan yang diprakarsai oleh negara (*state led solution*) yang dikaji melalui studi kasus dampak penetapan taman nasional terhadap penghidupan masyarakat di taman nasional kelimutu. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-eksplanatif dalam penelitian ini data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, informan dipilih melalui metode *snowballing*. Setiap data yang dikumpulkan ditriangulasi baik triangulasi informan maupun triangulasi metode. Data lain yang digunakan adalah data-data dokumen yang dikumpulkan dari laporan-laporan pihak terkait, laporan-laporan media, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Data juga berupa catatan-catatan lapangan dari hasil pengamatan. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan non-partisipan dan pengamatan partisipan. Selain itu juga digunakan metode etnografi untuk mengumpulkan data-data lapangan di tingkat komunitas. Metode analisis kualitatif-deskriptif politik ekologi digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Metode analisis tersebut adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, siapa aktor yang terlibat dalam solusi-solusi lingkungan, bagaimana relasi kuasa yang beroperasi, apa dan bagaimana proses yang terjadi, siapa pihak-pihak yang kalah, siapa yang mendapatkan manfaat, apa kepentingan masing-masing aktor, dan bagaimana dampaknya. Metode analisis wacana kritis juga digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis. Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis bagaimana wacana

solusi-solusi lingkungan terbentuk, berapa lama terbentuk, bagaimana wacana disebarkan, dan bagaimana aktor-aktor bertindak berdasarkan wacana tersebut, juga akan menganalisis bagaimana respon aktor-aktor terhadap wacana. Kajian disertasi ini menemukan baik dalam solusi yang diprakarsai negara maupun solusi oleh aktor non-negara (donor dan LSM) keduanya menunjukkan relasi kuasa yang asimetris terutama subordinasi terhadap masyarakat lokal. Aktor negara dan aktor non negara dalam mengimplementasikan solusi lingkungan masing-masing menggunakan subjektivitas mereka terhadap masyarakat lokal, aktor negara dengan kebijakan konservasinya dan aktor non-negara dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui proyek bantuan pembangunan internasional lingkungan skema REDD+. Temuan lain dari disertasi ini adalah subjektivitas-subjektivitas dari aktor eksternal tersebut telah membawa dampak bagi perubahan pola kehidupan masyarakat lokal. Disertasi ini juga menawarkan sebuah konsep baru yaitu konsep "subjektivitas eksternal". Subjektivitas eksternal terutama mengacu pada tindakan, praktik, pendekatan yang diterapkan terhadap masyarakat lokal yang didasarkan pada opini, penilaian, emosi, keyakinan, dan bahkan asumsi aktor eksternal (negara dan non-negara). Ini merupakan hasil interaksi antara kepentingan dan relasi kuasa asimetris antar aktor. Subjektivitas eksternal datang sebagai bundel hasil interaksi antara aktor, kepentingan dan relasi kuasa antar aktor yang terlibat di dalamnya. Subjektivitas eksternal bisa dipakai untuk memahami mengapa terjadi ketidakselarasan antara apa yang ingin diselesaikan oleh kebijakan dan proyek dengan apa yang diterapkan dan hasilnya.

Kata kunci: Aktor, Relasi Kuasa, Negara, Non-negara, pemberdayaan masyarakat, konservasi, REDD+, Bantuan Pembangunan, Subjektivitas Eksternal.

ABSTRACT

KARNO BAHARUDDIN BATIRAN. **THE POLITICAL ECOLOGY OF ENVIRONMENTAL SOLUTIONS IN INDONESIA: ACTORS, INTERESTS, AND POWER RELATIONS** (dibimbing oleh Muhammad Alif KS., Micah R. Fisher, dan Lambert Johan Verheijen)

Indonesia's abundance of natural resources is a double-edged sword. On the one hand, natural resources are one of the main drivers of the country's economic progress, on the other hand they are the main driver of environmental exploitation to a level that causes large-scale damage. In the last few decades, Indonesia has experienced very dramatic environmental damage which has also had a major impact on people's lives and livelihoods. From deforestation and forest degradation, loss of biodiversity to climate change. To deal with these environmental problems, environmental solution initiatives emerged. Environmental solutions are all initiatives undertaken to overcome environmental problems that occur in various schemes and at various levels, such as conservation projects carried out by the state, environmental solutions initiated by non-state actors such as donor agencies, INGO's and NGOs, as well as genuine local community initiatives at the site level. This dissertation examines how the actors, interests and power relationships in each environmental solution are implemented, why one is used as a solution, why one environmental solution is chosen over another, how the environmental solution is planned, where the idea for the environmental solution comes from, what is the response of local community towards the environmental solution, who benefits, who is marginalized as a result of the environmental solution and what is the impact of the environmental solution to the community. This dissertation consists of two study parts. One study that represents a market-based environmental solution (market based solution) is a case study of the REDD+ international environmental assistance project implemented in Berau Regency and one study of an environmental solution initiated by the state (state led solution) which is examined through a case study of the impact of the establishment of national park on community livelihoods in Kelimutu National Park. With a descriptive-explanatory qualitative approach in this research, qualitative data was obtained through in-depth interviews with key informants, informants using the snowballing method. Each data collected was triangulated, both informant triangulation and method triangulation. Other data used are document data collected from reports from related parties, media reports, and documents related to the research topics. Data also takes the form of field notes from observations. The observations made were non-participant observation and participant observation. Ethnography methods were also used to collect field data at the community level. The qualitative-descriptive analysis method of political ecology is used as an analytical method in this research. The method of analysis is to answer critical questions: who are the actors involved in environmental solutions, how power relations operate, what and how the process occurs, who are the losing parties, who benefits, what are their respective interests of each actor, and how they impact them. The critical discourse analysis method is also used in this research as an analytical tool. Critical discourse analysis is used to analyze how discourse on environmental solutions is formed, how long it takes to form, how the discourse is spread, and how actors act based on the discourse, it will also analyze how actors respond to the discourse. This dissertation study found that both state-initiated solutions and solutions by non-state actors (donors and NGOs) both show asymmetrical power relations, especially the subordination of local

communities. State actors and non-state actors in implementing environmental solutions each use their subjectivity towards local communities, state actors with their conservation policies and non-state actors with a community empowerment approach through international environmental development assistance projects, the REDD+ scheme. Another finding from this dissertation is that the subjectivities of these external actors have had an impact on changes in the livelihood patterns of local communities. This dissertation also offers a new concept, namely the concept of "external subjectivity". External subjectivity mainly refers to the actions, practices, approaches applied towards local communities that are based on the opinions, judgments, emotions, beliefs and even assumptions of external (state and non-state) actors. This is the result of interactions between interests and asymmetric power relations between actors. External subjectivity comes as a bundle resulting from interactions between actors, interests and power relations between the actors involved. External subjectivity can be used to understand why there is a misalignment between the intended goals and outcomes of policies and programs and what is implemented and the results.

Keywords: Environmental Solution, Actors, Power Relations, State, Non-State, Community Empowerment, Conservation, REDD+, International Development Aid, External Subjectivity.

PUBLIKASI ARTIKEL

1. Judul Artikel : *Creating Commons: Reflections on Creating Natural Resource Management Regimes in South Sulawesi, Indonesia.*
- Status : Terbit/Published, Jurnal terindeks scopus (SJR Q1) dan web of science
- Jurnal : Forest and Society, 5(2), 619-630.
- Laman (DOI) : <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.14768>
2. Judul Artikel : *Uprooting the Mosalaki: Changing institutions and livelihood impacts at Kelimutu National Park.*
- Status : Terbit/Published, Jurnal terindeks scopus (SJR Q1) dan web of science
- Jurnal : Forest and Society, 7(2), 295-310
- Laman (DOI) : <https://doi.org/10.24259/fs.v7i2.26464>
3. Judul Artikel : *External subjectivity: how international and national discourse & agenda directing the environment solution to the local. Case study on the Heart of Borneo (HoB) Berau, East Kalimantan, Indonesia.*
- Status : Terbit/Published, Jurnal terindeks scopus (SJR Q1) dan web of science
- Jurnal : Forest and Society.
- Laman (DOI) : -

PEMAKALAH DI KONFERENSI INTERNASIONAL

1. Judul Makalah : Creating Commons: Reflections on Creating Natural Resource Management Regimes in South Sulawesi, Indonesia.

Konferensi : Forest Commons Virtual Conference

Penyelenggara : International Association for the Study of the Commons (IASC)

Waktu : 3 September 2021
2. Judul Makalah : Community Empowerment as Strategic Distraction in REDD+: Why International environmental aid projects have failed to mitigate greenhouse gas emission in East Kalimantan, Indonesia.

Konferensi : The 2023 AIFIS-MSU Conference on Indonesian Studies

Penyelenggara : AIFIS-MSU

Waktu : 14 Juli 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	v
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
PUBLIKASI ARTIKEL	xii
PEMAKALAH DI KONFERENSI INTERNASIONAL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Pertanyaan Penelitian	4
1.3. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Solusi Berbasis Ekonomi Pasar: Neoliberalisme Konservasi.....	9
2.2. Solusi yang Dipraktekkan Oleh Negara	12
2.3. Politik Bantuan Internasional dan Bantuan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	13
2.4. REDD+	15
2.5. Ekologi Politik.....	17
2.6. Hegemoni dan Analisis Wacana.....	19
BAB III PROYEK LINGKUNGAN DI BERAU: APA, SIAPA DAN BAGAIMANA	23
3.1. Sejarah Proyek Lingkungan di Berau.....	24
3.2. Isu-isu Proyek lingkungan di Berau.....	24
3.3. Skema Pendanaan Proyek Lingkungan.....	25
3.4. Aktor-Aktor Proyek-Proyek Lingkungan di Berau	23
3.5. Hubungan Asimetris dari Rangkaian Rantai Aktor	25
3.6. Dampak Proyek Lingkungan di Berau: mengubah pranata menciptakan ketergantungan	27
BAB IV DISTRAKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM REDD+: MENGAPA PROYEK BANTUAN LINGKUNGAN	

INTERNASIONAL GAGAL MEMITIGASI EMISI GAS RUMAH KACA DI KABUPATEN BERAU	34
4.1. Bantuan International Sektor Lingkungan dan Kehutanan.....	36
4.2. Situasi Lingkungan dan Tujuan REDD+ di Indonesia	37
4.3. Deforestasi dan Degradasi Lahan di Kabupaten Berau	38
4.4. Deforestasi dan Degradasi Lahan dari Industri Kayu	39
4.5. Deforestasi dan Degradasi Lahan dari Perkebunan Sawit dan Tambang	42
4.6. Apa yang Dilakukan oleh Proyek-Proyek REDD+ dan Bagaimana Dampaknya?	46
BAB V ANALISIS WACANA: KONSTRUKSI MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA REDD+ DI BERAU	50
5.1. Warga Sebagai Perusak Hutan.....	50
5.2. Hilangnya Peran Perusahaan Swasta	54
5.3. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Solusi	57
5.4. Tanda + dalam REDD+	59
BAB VI MENCERABUT MOSALAKI: TAMAN NASIONAL, PERUBAHAN INSTITUSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGHIDUPAN DI KELIMUTU.....	63
6.1 Taman Nasional Di Indonesia dan Pembentukan Taman Nasional Kelimutu	64
6.2 Pergeseran Kewenangan, Pergeseran Penghidupan	66
6.3 Latar Lokasi Penelitian	67
6.4 Perspektif Penetapan Taman Nasional Kelimutu	69
6.5 Mosalaki dan otoritas tradisional pengelolaan sumberdaya alam. 70	
6.6 Mosalaki vs. Balai Taman Nasional	73
6.7 Pelucutan Otoritas Mosalaki Atas Kontrol Sumber Daya Alam di Wilayah Adat.....	74
6.8 Pelemahan Otoritas Mosalaki Berlanjut.....	75
6.9 Aturan Baru Taman Nasional vs. Penghidupan Masyarakat Lokal	77
BAB VII BAGAIMANA SUBJEKTIVITAS EKSTERNAL AKTOR NEGARA DAN NON-NEGARA BEKERJA	84
BAB VIII PENUTUP	87
8.1. Kesimpulan.....	87
8.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	8
Gambar 2. Lokasi Penelitian.....	23
Gambar 3. Alur Bantuan Internasional.....	21
Gambar 4: Aktor-Aktor Proyek REDD+ di Indonesia.....	26
Gambar 5. Tutupan Lahan Kabupaten Berau Tahun 1990	37
Gambar 6. Tutupan Lahan Kabupaten Berau Tahun 2020	38
Gambar 7. IUPHHK Kabupaten Berau.....	40
Gambar 8. Deforestasi Kawasan Hutan di Kabupaten Berau	41
Gambar 9. Peta Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan Kabupaten Berau	43
Gambar 10. Peta Tambang Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Berau ...	44
Gambar 11. Peta Reforestasi Kabupaten Berau	45
Gambar 12. Peta Taman Nasional Kelimutu dan tiga desa penelitian	69
Gambar 13. Pergeseran kewenangan dan penghidupan masyarakat lokal di Kelimutu.....	80
Gambar 14. Subjektivitas Eksternal.....	86

DAFTAR SINGKATAN

ADB	Asia Development Bank (Bank Pembangunan Asia)
BIKAL	Bina Kelola Lingkungan
BUMKAM	Badan Usaha Milik Kampung
CDA	Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)
CDM	Clean Development Mechanism (Mekanisme Pembangunan Bersih)
CEPF	Critical Ecosystem Partnership Fund
COP	Conference of Parties (Konferensi para pihak)
COVID 19	Coronavirus Disease 2019
CPR	Common Pool Resources (Sumber Daya Kelola Bersama)
ERP	Eco-Regional Planning
FGD	Focus Group Discussion
FLIM	Forum Lingkungan Mulawarman
FORCLIME	Forests and Climate Change Programme
GCF	Green Climate Fund
GEF	Global Environment Facility
GFATM	Global Fund AIDS Tuberculosis Malaria
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Kerjasama Pembangunan Jerman)
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
IUPHHK-HA	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
IUPHHK-HT	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
JAVLEC	Java Learning Center
JI	Joint Implementation (Implementasi Gabungan)
KEHATI	Yayasan Keanekaragaman Hayati
KFW	the Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bank Pembangunan dan Investasi Jerman)
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
KUPS	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LPHD	Lembaga Pengelolaan Hutan Desa
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MCAI	Millenium Challenge Account International
MRV	Measurement, Reporting, and Verification (Pengukuran, Pelaporan, Verifikasi)
NFMS	National Forest Monitoring Systems
NGO	Non-Governmental Organization

NORAD	Norwegian Agency for Development Cooperation
ODA	Official Development Assistance
OECD	The Organisation for Economic Co-operation Development
PERISAI	Perisai Alam Borneo
PES	Payments for Ecosystem Services
PKHB	Program Karbon Hutan Berau
POKDARWIS	Kelompok Sadar Wisata
REDD+	Reducing Emission From Deforestation and Land Degradation Plus
REL/RL	Reference Emission Levels/Reference Level
RSPO	Roundtable Sustainable Palm Oil
SFM	Sustainable Forest Management
SIGAP	Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan
SIS	Sistem Informasi Safeguards
SLA	Sustainable Livelihood Analysis
TFCA	Tropical Forest Conservation Act
TNC	The Nature Conservation
UGM	Universitas Gadjah Mada
UKAID	United Kingdom AID
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNICEF	United Nations Children's Fund
USAID	United States AID
WWF	World Wildlife Fund
YKAN	Yayasan Konservasi Alam Nusantara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi sumber daya alam menjadi salah satu penyokong utama kemajuan ekonomi negara, di sisi lain menjadi pendorong utama eksploitasi lingkungan sampai ke tingkat yang menyebabkan kerusakan skala besar. Data KLHK yang tercatat oleh BPS (Widya dkk., 2019), menyebutkan jika deforestasi paling tinggi pada kurun 2011-2018 terjadi pada periode 2014-2015 dengan luas 1,09 juta ha—namun rekor deforestasi paling tinggi yang tercatat adalah deforestasi yang terjadi pada periode 1996-2000 dengan laju 3,51 juta ha/tahun. Tingginya angka deforestasi disebabkan oleh di antaranya adalah konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan atau lahan konsesi raksasa untuk pertanian dan perkebunan, eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan (mineral, batubara, migas, geothermal), pembakaran hutan dan lahan, hingga konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur—beberapa faktor di atas juga jadi sumber konflik panjang antara masyarakat yang tinggal di wilayah hutan dengan pemilik konsesi dan aktor negara (Peluso, 1994; FWI, 2003; FWI, 2019).

Ekosistem laut juga menghadapi ancaman kerusakan yang sama seriusnya. Rentang 1999-2011 23% terumbu karang mengalami kerusakan—sementara salah satu data tersedia yang memuat tentang kerusakan mangrove menyebutkan bahwa pada periode 1980-2005 Indonesia tercatat telah kehilangan lebih dari 30% ekosistem mangrovenya (Carter, 2018). Menurut Carter (2018), praktik penangkapan, seperti penggunaan bahan peledak, pukot tarik pantai, dan racun, merusak habitat terumbu karang dan biota laut—penggunaan pukot cincin, pukot hela dan jaring insang pada industri (skala besar) juga sama merusaknya—sementara jaring yang telah ditinggalkan di laut juga menjadi ancaman lain. Semua kerusakan itu adalah gerbang masuk menuju bencana lingkungan yang lebih besar.

Eksploitasi terhadap sumberdaya alam Indonesia telah berlangsung bahkan sejak zaman kolonial. Sejumlah temuan menunjukkan jika degradasi lahan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1500 an (Boomgard dkk., 2009). Dampak

kerusakannya mulai terlihat di rentang dekade 1970an hingga 2000an, dengan eksploitasi dan kerusakan multidimensi: eksploitasi dan kerusakan sumber daya hutan, sumber daya laut dan belakangan diperparah oleh perubahan iklim (Widya dkk., 2019; Rochwulaningsih, 2017).

Selain persoalan eksploitasi eksekif sumberdaya hutan dan laut ada juga persoalan konflik tenurial kawasan hutan dan konflik akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan skala besar (Susilowati, 2015; Mas'ud dkk., 2017), termasuk isu penyingkiran kelompok masyarakat marjinal (Topatimasang, 2016; Li, 2012). Dan yang paling baru adalah perubahan iklim, Indonesia sebagai kontributor signifikan terhadap gas rumah kaca penyebab pemanasan global—Indonesia sempat berada di urutan keempat pada tahun 2015 sebagai negara dengan Gas Rumah Kaca terbesar di dunia (Dunne, 2019), lalu saat ini menjadi negara terkotor keenam di dunia dalam hal emisi gas rumah kaca.

Merespon persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi tersebut kemudian muncul inisiatif-inisiatif solusi lingkungan. Solusi lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi dalam berbagai skema dan berbagai tingkatan, seperti proyek-proyek konservasi (baik yang bentuknya program maupun kebijakan seperti pembentukan kawasan konservasi, misalnya pembentukan taman nasional, cagar alam, suaka alam, dll), ekowisata, pembayaran layanan ekosistem, skema perdagangan karbon, perhutanan sosial, dan lain-lain. Solusi-solusi lingkungan tersebut bisa saja diprakarsai baik aktor negara (state), aktor di luar negara (non state) seperti Lembaga-lembaga donor internasional dan LSM-LSM, maupun inisiatif asli warga di tingkat tapak.

Banyak kerangka dan skema solusi-solusi lingkungan yang diterapkan di Indonesia. Setidaknya ada dua tipologi solusi lingkungan yang banyak dimunculkan dan diterapkan, yang pertama adalah *market-based solution* (solusi berbasis pasar atau kadang juga disebut konservasi neoliberal), solusi yang didorong oleh pasar misalnya skema perdagangan karbon dan REDD+, pembayaran jasa layanan ekosistem, sertifikasi global, ekowisata (Giessen dkk., 2016; Sproule dkk., 1998). Kedua adalah solusi lingkungan yang diprakarsai oleh negara, *state led solution* yang dalam bentuk kebijakan seperti penetapan kawasan konservasi (cagar alam, suaka alam, taman nasional), dalam bentuk program seperti program perhutanan sosial, dan program tanah objek reforma agraria (Riggs dkk., 2016; Nurrochmat dkk., 2020). Dalam kurun waktu dua dekade

terakhir proyek-proyek REDD+ banyak dikerjakan di Indonesia, sementara dalam beberapa dekade terakhir pula secara luas kebijakan-kebijakan konservasi negara banyak diterapkan.

Sama seperti proyek proyek pembangunan yang lain, solusi lingkungan menarik untuk ditelisik. Banyak pertanyaan yang patut diajukan atasnya. Mengapa satu resep dijadikan sebagai solusi? Mengapa satu solusi lingkungan dipilih ketimbang solusi lingkungan yang lain? Bagaimana solusi lingkungan tersebut direncanakan? Darimana datangnya ide solusi lingkungan tersebut? Bagaimana solusi lingkungan tersebut dipromosikan? Bagaimana diterapkan? Bagaimana respon dan sikap warga di tingkat tapak terhadap solusi lingkungan tersebut? Siapa yang mendapatkan manfaat? Siapa yang menjadi korban? Siapa yang tersingkir akibat dari solusi lingkungan tersebut? Apa dampak dari solusi lingkungan tersebut terhadap warga? Dan pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya.

Gugatan-gugatan yang diajukan terhadap proyek-proyek pembangunan juga terhadap persoalan ekologi dan persoalan agraria (misalnya *global land grabbing*) (Borras, 2007; Borras dkk., 2011; Borras & Franco, 2012; Borras, 2016) bahwa dibalik proses-proses yang membentuk persoalan ekologi dan persoalan agraria ada orang-orang yang kalah, orang tereksklusi, apakah mereka punya pilihan dan kuasa serta persoalan-persoalan politik ekonomi lainnya yang melingkupinya. Gugatan-gugatan tersebut juga berlaku untuk inisiatif-inisiatif solusi lingkungan yang selama ini dipilih untuk dilakukan.

Penelitian ini melihat dari perspektif ekologi politik terhadap pilihan-pilihan solusi lingkungan yang dilaksanakan di Indonesia. Untuk melihat aspek tersebut penelitian ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ekologi politik. Pertanyaan-pertanyaan untuk menelaah aktor, relasi kuasa, proses atau tekanan yang terjadi, menelaah siapa yang mendapat manfaat, siapa yang kalah, apa yang mereka lakukan dengan manfaat yang diperoleh, bagaimana proses tersebut membentuk *landscape* dan politik demikian pula sebaliknya.

Penelitian ini menginvestigasi apa yang terjadi dan apa yang mungkin terjadi melalui skema-skema tersebut. Apa dampak dari solusi-solusi lingkungan yang dipilih tersebut, selain tentu saja niat mulia penyelamatan lingkungan, jika memang demikian. Yang membuat topik ini menarik adalah bahwa solusi lingkungan tersebut selama ini, di Indonesia, hanya dilihat dari satu sisi, yaitu sisi “baik”nya, sisi “suci” dari solusi-solusi lingkungan tersebut. Ia tidak pernah ditelisik dari sudut pandang berbeda, misalnya agenda yang melatari solusi-solusi lingkungan yang

direncanakan, dipromosikan, dan diterapkan tersebut. Misalnya agenda *green grabbing* (Fairhead dkk., 2012), dimana proyek-proyek lingkungan ditengarai memiliki agenda perampasan sumberdaya (lahan) atas nama lingkungan, juga agenda *neo-liberalisme conservation* (Holmes & Cavanagh, 2016) yang ditengarai sebagai cara mempengaruhi dan membentuk kembali nilai-nilai upaya konservasi agar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi pasar.

Solusi lingkungan perlu diperlakukan sebagai fenomena yang memiliki tiga dimensi: latar belakang, proses, dan dampaknya. Hal tersebut menarik untuk dipahami dan diteliti mengingat ketiga dimensi tersebut tentu saja membawa berbagai implikasi, misalnya implikasi terhadap penghidupan warga, implikasi terhadap tata kelola sumberdaya alam, dan implikasi-implikasi lainnya.

1.2. Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan di antaranya: a). menganalisis bagaimana solusi-solusi lingkungan dirancang, dipromosikan dan diimplementasikan di Indonesia; b). mengidentifikasi siapa aktor-aktor yang terlibat dalam solusi-solusi lingkungan yang diterapkan di Indonesia; c). mengidentifikasi dan menganalisis relasi kuasa yang beroperasi antar aktor dalam solusi-solusi lingkungan yang diterapkan di Indonesia; d). mengidentifikasi dan menganalisis proses yang terjadi dalam perumusan, promosi dan penerapan solusi lingkungan di Indonesia; dan e). mengidentifikasi dan menganalisis kepentingan-kepentingan masing-masing aktor atas solusi lingkungan yang diterapkan di Indonesia.

Diturunkan dari tujuan tersebut penelitian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan: Siapa aktor-aktor yang terlibat dalam solusi-solusi lingkungan yang diterapkan di Indonesia? Bagaimana relasi kuasa yang beroperasi antar aktor dalam solusi-solusi lingkungan yang diterapkan di Indonesia? Bagaimana proses yang terjadi dalam perumusan, promosi dan penerapan solusi lingkungan di Indonesia? Apa kepentingan masing-masing aktor atas solusi lingkungan yang diterapkan di Indonesia? Dan bagaimana dampak dari relasi kuasa yang terjalin dalam implementasi solusi-solusi lingkungan. Solusi lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi dalam berbagai skema dan berbagai tingkatan, diprakarsai oleh berbagai agen seperti Lembaga-lembaga donor internasional, pemerintah (negara) maupun inisiatif asli warga di tingkat

tapak. Penelitian ini akan dibatasi hanya akan mengkaji solusi lingkungan skema ekowisata dan perhutanan sosial.

1.3. Metode Penelitian

Sebagai Penelitian kualitatif deskriptif-eksplanatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitiannya dalam penelitian ini data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, informan dipilih melalui metode *snowballing*. Setiap data yang dikumpulkan ditriangulasi baik triangulasi informan maupun triangulasi metode. Data lain yang digunakan adalah data-data dokumen yang dikumpulkan dari laporan-laporan pihak terkait, laporan-laporan media, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Data juga berupa catatan-catatan lapangan dari hasil pengamatan. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan non-partisipasi dan pengamatan partisipasi. Pengamatan partisipasi akan dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat di desa-desa penelitian dalam hal ini hanya sebagai pengamat saja, sementara pengamatan partisipasi akan dilakukan dengan ikut serta dan terlibat secara langsung dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh komunitas untuk memahami perspektif komunitas yang diamati. Sementara data Primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dan nara sumber yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen, data-data statistik, peta-peta, laporan-laporan yang relevan dengan penelitian. Selain itu juga digunakan metode etnografi untuk mengumpulkan data-data lapangan di tingkat komunitas. Metode analisis kualitatif-deskriptif politik ekologi digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Metode analisis tersebut adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, siapa aktor yang terlibat dalam solusi-solusi lingkungan, bagaimana relasi kuasa yang beroperasi, apa dan bagaimana proses yang terjadi, siapa pihak-pihak yang kalah, siapa yang mendapatkan manfaat, apa kepentingan masing-masing aktor, bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk politik dan *landscape* demikian juga sebaliknya (Blaiki & Brookfield, 1987; Byres, 1995; Bernstein, 1997; Forsyth, 2003; Neuman, 2009; Borrás, 2009).

Metode analisis wacana kritis juga digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis. Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis bagaimana wacana solusi-solusi lingkungan terbentuk, berapa lama terbentuk, bagaimana wacana disebar, dan bagaimana aktor-aktor bertindak berdasarkan wacana

tersebut, juga akan menganalisis bagaimana respon aktor-aktor terhadap wacana (Philip & Hardy 2002).

Analisis wacana kritis pada dasarnya adalah sebuah metode yang dipakai untuk mengurai dan menjelaskan wacana (realitas sosial, fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa, tindakan, simbol, kebijakan) yang diproduksi oleh kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Asumsi dasarnya adalah bahwa dibalik sebuah wacana terdapat makna dan imaji/citra yang diinginkan serta kepentingan yang diperjuangkan. Metode-metode tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat secara lebih komprehensif atas solusi-solusi lingkungan yang ditawarkan dan dilakukan selama ini.

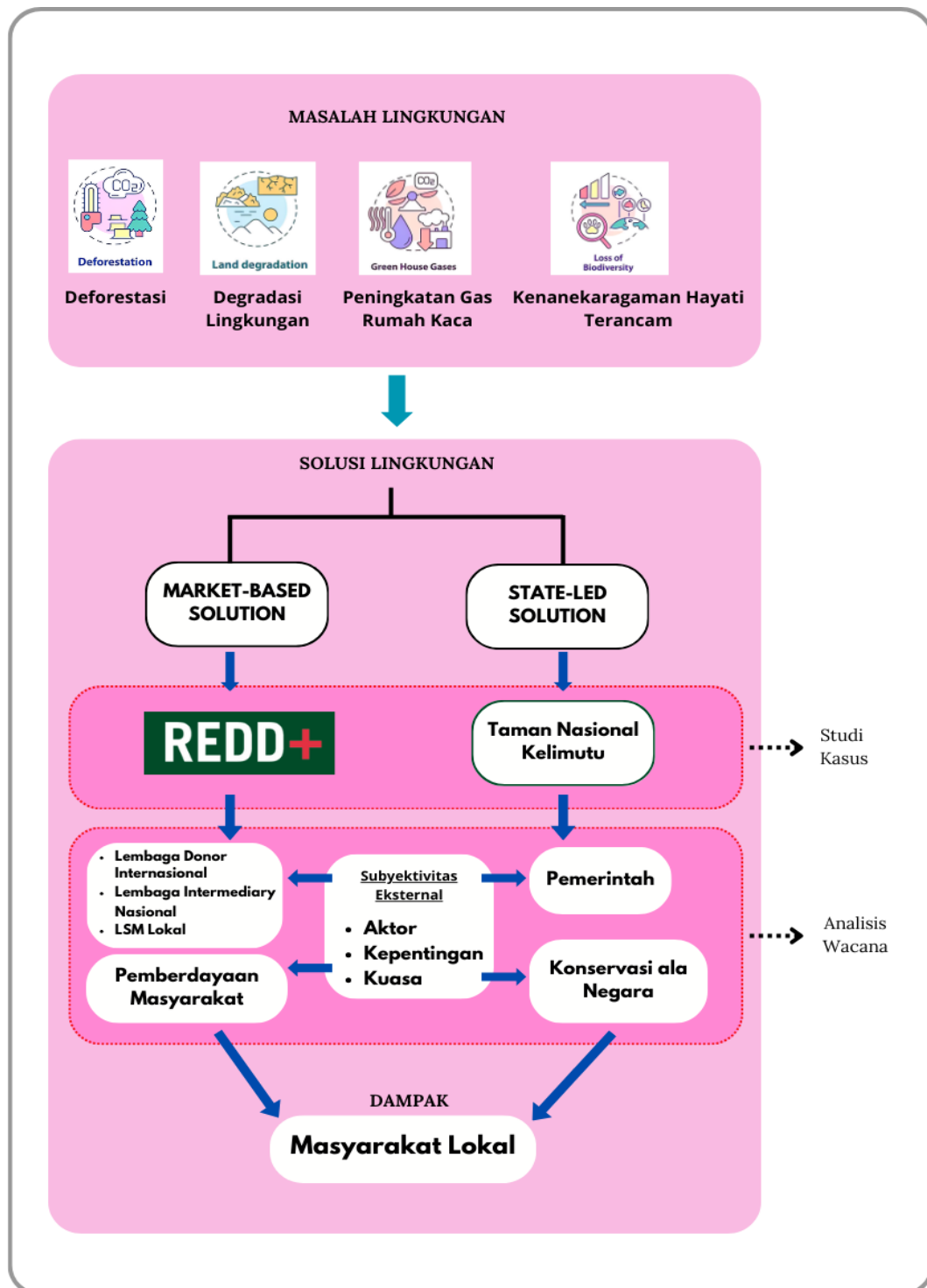
Disertasi ini terdiri dari dua bagian kajian. Satu kajian yang mewakili solusi lingkungan berbasis ekonomi pasar (*market based solution*) yaitu studi kasus terhadap proyek bantuan internasional lingkungan skema REDD+ yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. Satu kajian terhadap solusi lingkungan yang diprakarsai oleh negara (*state led solution*) yang dikaji melalui studi kasus dampak penetapan taman nasional terhadap penghidupan masyarakat di taman nasional kelimutu.

Untuk studi kasus proyek lingkungan bantuan internasional kajiannya sebagian besar dilandaskan pada interaksi saya selama menjadi bagian dari proyek Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan selama periode 2015 – 2019 yang saya perlakukan sebagai data dari proses pengamatan partisipan. Penelitian ini juga mewawancarai 26 informan kunci yang mewakili LSM-LSM yang melaksanakan proyek-proyek lingkungan di Kabupaten Berau, informan kunci yang mewakili lembaga dan/atau pemberi dana juga warga kampung penerima manfaat proyek lingkungan di Kabupaten Berau. Data penelitian ini juga diperoleh melalui dokumen-dokumen proyek-proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. Peneliti melakukan observasi di 7 (tujuh) kampung lokasi proyek-proyek lingkungan di antaranya, Kampung Teluk Semanting, Kampung Pegat Batumbuk, Kampung Merasa, Long Duhung, Kampung Merabu, Kampung Biatan Ilir dan Kampung Dumaring, ke tujuh kampung tersebut merentang dari area hulu sampai pesisir Kabupaten Berau. Fieldwork dilakukan Juli dan Agustus 2022, selain itu pengalaman peneliti mengerjakan proyek lingkungan di Kabupaten Berau dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 juga diperlakukan sebagai data dalam penelitian ini. Informan dipilih melalui pendekatan *snowball* berdasarkan wawancara dengan

informan sebelumnya. Wawancara semi-terstruktur dipakai di seputar topik-topik terkait dan relevant dengan topik sejarah, aktor, relasi stakeholder proyek-proyek lingkungan yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. Masing-masing wawancara berkisar antara 60 sampai 120 menit masing-masing informan. Metode analisis dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif dari studi kasus yang menjelaskan bagaimana interaksi antara kuasa, aktor dan kepentingan dari berbagai pihak yang terkait dalam proyek-proyek lingkungan di Kabupaten Berau. Metode lain yang digunakan adalah metode analisis wacana untuk melihat bagaimana Menganalisis ragam asumsi-asumsi dasar aktor-aktor tentang apa yang mereka maksud sebagai solusi lingkungan, mengidentifikasi konsep-konsep dibalik proyek-proyek lingkungan, mengidentifikasi apa tujuan wacana itu dibangun dan bagaimana cara kerjanya. Juga untuk mengetahui apa sudut pandang dan asumsi dasar dibalik konsep solusi lingkungan yang dipakai, apa dan bagaimana hubungan antara sudut pandang tersebut, apa tujuan wacana itu dibangun dan bagaimana cara kerjanya.

Kajian kedua dilaksanakan di Taman Nasional Kelimutu kabupaten Ende. Studi ini dilakukan dengan mewawancarai 34 informan kunci dan 9 FGD dengan warga desa setempat (laki-laki, perempuan, dan pemuda), ketua lembaga adat, pemerintah desa, staf LSM, dan petugas Taman Nasional. Pengumpulan data dilakukan di tiga desa di sekitar Taman Nasional Kelimutu, yaitu Desa Saga dan Niowula di Kecamatan Detuseko, dan Desa Pemo di Kecamatan Kelimutu, semuanya berada di Kabupaten Ende, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Selain wawancara mendalam dan FGD, juga dilakukan observasi di tiga desa dan wilayah lain di sekitar Taman Nasional Kelimutu. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan April - Juni 2019 dan kunjungan kembali pada bulan September - November 2021. Informan dipilih melalui pendekatan bola salju berdasarkan informan yang telah diwawancarai sebelumnya. Wawancara semi-terstruktur diterapkan pada seputar topik-topik perubahan dalam institusi dan tata kelola lahan, pandangan informan mengenai perubahan tersebut, tingkat dan dampak perubahan terhadap penduduk desa setempat, semuanya berada dalam kerangka ekonomi politik dan penghidupan berkelanjutan. Masing-masing wawancara berlangsung kurang lebih 60 hingga 120 menit untuk setiap informan. Metode analisis yang digunakan untuk kajian adalah kerangka analisis penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood analysis/SLA) yang dikembangkan oleh Scoones (lebih lanjut dijelaskan di bab 6).

1.4. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian ekologi politik solusi lingkungan di Indonesia bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang, proses dan dampak dari solusi lingkungan yang diimplementasikan. Selain itu, dalam studi ini juga dianalisis aktor-aktor yang terlibat beserta relasi kuasa yang terjadi di dalamnya. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus di dua lokasi, yaitu program REDD+ di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan kebijakan Taman Nasional Kelimutu di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan dua lokasi tersebut sebagai studi kasus, untuk mewakili dua pokok kajian, yakni solusi berbasis ekonomi pasar (*market based solution*) yang diwakili oleh program bantuan internasional lingkungan skema REDD+ di Kabupaten Berau, dan solusi yang diprakarsai negara (*state led solution*) diwakili studi kasus kebijakan konservasi negara melalui Taman Nasional Kelimutu.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada bab ini akan dibahas beberapa konsep dan teori beserta studi-studi yang pernah dilakukan yang menjadi dasar dari kerangka konseptual (*conceptual framework*) penelitian ini. Konsep-konsep dan studi terkait yang akan dibahas tersebut diantaranya, *market-based conservation (neo liberal conservation)*, *state led conservation*, politik bantuan internasional, REDD+, serta konsep hegemoni dan analisis wacana.

2.1. Solusi Berbasis Ekonomi Pasar: Neoliberalisme Konservasi

Solusi berbasis ekonomi pasar dalam bentuk konservasi dalam literatur-literatur kadang juga dikenal dengan sebutan konservasi neoliberal (*neoliberal conservation*). Banyak yang menganggap bahwa pendekatan ini bukan pendekatan yang tepat sehingga berakhir pada kegagalan. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa model ini memberikan banyak keuntungan sehingga tepat untuk dilakukan.

Menurut Karen Allen (2018), istilah *neoliberal consevation* berpijak pada mekanisme kebijakan berbasis pasar yang bertujuan untuk mempromosikan konservasi dengan memasukkan lingkungan ke dalam transaksi pasar. Bridget Marie Henning (2015) menyatakan bahwa *market-based*, atau proyek neoliberal ini dirancang berdasarkan asumsi ekonomi bahwa orang akan membuat

keputusan yang rasional, mementingkan diri sendiri dan mencari keuntungan. Sedangkan Joe Igoe dan Dan Brockington (2007) berpendapat bahwa secara umum, *market-based conservation* tidak menekankan tanggung jawab perlindungan lingkungan pada pemerintah, sehingga konteks konservasi perlu diserahkan ke mekanisme pasar. Konsep *neoliberal conservation* dijelaskan secara lebih lengkap sebagai berikut:

Neoliberalisation involves the reregulation of nature through forms of commodification. This, in turn, entails new types of territorialisation: the partitioning of resources and landscapes in ways that control, and often exclude, local people. Territorialisation is a starkly visible form of reregulation, which frequently creates new types of values and makes those values available to national and transnational elites. Finally, neoliberalisation has also coincided with the emergence of new networks that cut across traditional divides of state, non-governmental organisation (NGO), and for-profit enterprise. These networks are rhetorically united by neoliberal ideologies and are combining in ways that profoundly alter the lives of rural people in areas targeted (Igoe & Brockington: 2007)

Neoliberalisasi melibatkan pengaturan ulang alam melalui bentuk komodifikasi. Hal ini, pada gilirannya, memerlukan jenis teritorialisasi baru: pembagian sumber daya dan lanskap yang mengontrol, dan sering kali mengecualikan, masyarakat lokal. Teritorialisasi adalah bentuk reregulasi yang sangat nyata, yang seringkali menciptakan nilai-nilai baru dan menjadikan nilai-nilai tersebut tersedia bagi para elit nasional dan transnasional. Yang terakhir, neoliberalisasi juga terjadi bersamaan dengan munculnya jaringan-jaringan baru yang melintasi batasan-batasan tradisional antara negara, organisasi non-pemerintah (LSM), dan entitas nirlaba. Jaringan-jaringan ini secara retorik disatukan oleh ideologi neoliberal dan digabungkan sedemikian rupa sehingga sangat mengubah kehidupan masyarakat pedesaan di wilayah yang menjadi sasarannya (Igoe & Brockington: 2007)

Berdasarkan argumen tersebut, dapat dikatakan bahwa *market-based conservation* merupakan sebuah bentuk komodifikasi lingkungan yang mementingkan aspek ekonomi dan dalam banyak praktiknya seringkali meminggirkan masyarakat lokal.

Namun demikian, para pendukung model ini berpendapat bahwa konservasi neoliberal menjanjikan banyak hal. Potensi tersebut diantaranya adalah penambahan jenis sumber daya baru dalam konservasi keragaman hayati di negara-negara miskin, peningkatan demokrasi dan partisipasi, melindungi masyarakat pedesaan, menjamin hak masyarakat adat, meningkatkan usaha yang ramah lingkungan, serta melalui ekowisata, konservasi neoliberal berjanji untuk meningkatkan kesadaran konsumen di negara-negara barat untuk mencintai

lingkungan sekaligus melakukan konservasi yang lebih efektif dan efisien (Ferraro dan Kiss, 2002; Igoe dan Brockington 2007).

Dalam studinya Bram Büscher (2012) dalam studinya tentang intervensi *payment for ecosystem / environmental services* (PES) di wilayah Maloti-Drakensberg Afrika Selatan, menyebutkan bahwa solusi yang berasal dari mekanisme yang sama yang menyebabkan persoalan lingkungan, tidak dapat dijadikan solusi. Studi ini mengkaji mekanisme konservasi ekosistem yang tunduk pada dinamika pasar dan sering kali dianggap sebagai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) terhadap permasalahan ekologi, pembangunan, dan ekonomi yang ada saat ini. PES sebagai bentuk 'konservasi neoliberal' merupakan turunan dari mekanisme ekonomi politik neo liberal global yang juga telah diadopsi dan oleh Afrika Selatan. Yang ironisnya mekanisme politik ekonomi itu pulalah yang menjadi penyebab banyak masalah lingkungan dan sosial di wilayah Maloti-Drakensberg. Disebutkan pula bahwa solusi mekanisme pasar alih-alih meringankan persoalan justru mungkin akan memperkuat masalahnya. Berangkat dari kesimpulan PES sebagai 'konservasi neo liberal' tersebut, Buscher menyimpulkan bahwa pasar kapitalis tidak dapat menjadi jawaban atas kontradiksi ekologis yang ada.

Bridget Marie Henning (2015) juga melakukan studi bertajuk "*Market-based Conservation in Melanesia: Contrasting Expectations of Landowners and Conservationists*". Studi yang dilakukan di Papua Nugini ini menunjukkan bahwa terdapat asumsi yang berbeda antara pelestari lingkungan dengan masyarakat Melanesia. *Market-based conservation* mengasumsikan bahwa pertukaran terjadi antara aktor-aktor yang independen dan mempunyai kepentingan sendiri, namun penduduk Melanesia berasumsi bahwa pertukaran terjadi antara aktor-aktor yang mempunyai kewajiban moral dan saling bergantung. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan, diperlukan pendekatan konservasi yang sesuai dengan budaya, dan pendekatan konservasi yang sensitif secara budaya di Melanesia, mengharuskan para pelestari lingkungan untuk bernegosiasi dan menegosiasikan kembali pertukaran dengan penduduk desa. Mendukung upaya konservasi yang seperti itu memerlukan transformasi dalam organisasi donor. Dengan pendekatan konservasi seperti itu tidak hanya akan menghasilkan konservasi berkelanjutan tapi juga konservasi yang lebih etis.

Berdasarkan konsep dan contoh studi yang telah dilakukan, maka penelitian ini juga mengkaji implementasi program REDD+ di Kabupaten Berau, sebagai

contoh solusi lingkungan dengan model *market-based conservation* (*neoliberal conservation*). Dengan asumsi model tersebut, akan dianalisis bagaimana asumsi yang dibangun setiap aktor, relasi kuasa yang terjadi, serta bagaimana dampaknya, baik bagi masyarakat maupun pada efektifitas program itu sendiri.

2.2. Solusi yang Diprakarsai Oleh Negara

Berbeda halnya dengan *market-based conservation* atau *neoliberal conservation*, dimana solusi lingkungan sebagai bentuk komodifikasi lingkungan dibentuk oleh *free market*, maka *state led conservation* merupakan solusi lingkungan yang diinisiasi oleh negara. Tidak banyak kajian yang dilakukan untuk topik ini, terutama untuk konteks Indonesia. Salah satu kajian yang tersedia adalah dari Matthew Kelly et al (2017), yang menyebutkan bahwa konservasi yang diprakarsai oleh negara adalah bentuk yang khas di mana negara berusaha mendefinisikan dan menghasilkan alam sesuai dengan apa yang para ahli persepsikan sebagai cetak biru alam, memberikan sudut pandang yang sengaja dipilih untuk mengeksplorasi alam sesuai yang diinginkan. Pendapat tersebut mengimplikasikan bahwa pada dasarnya negara menginginkan konservasi sesuai dengan konservasi yang menurut para ahli ideal dari sudut pandangnya. Selanjutnya, Matthew Kelly et al (2017) menilai skema ini gagal karena didasarkan pada perhitungan lingkungan alam yang disederhanakan dan reduktif.

Studi mengenai *state led conservation* yang lain yang dilakukan adalah oleh Wilko Graf von Hardenberg (2017) yang mengkaji intervensi negara untuk mengatasi konflik antara peternak dan beruang cokelat di Italia. Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana intervensi negara terhadap konservasi tidak selalu berhasil dalam menyelesaikan persolan konservasi.

Studi selanjutnya dilakukan oleh KuoRay Mao dan Qian Zhang (2018), yang berjudul "*Dilemmas of State-Led Environmental Conservation in China: Environmental Target Enforcement and Public Participation in Minqin County*". Penelitian ini mengkaji respon multilevel pemerintah China terhadap krisis ekologi dan sosial ekonomi yang akut di Kabupaten Minqin (Minqin Xian) di provinsi Gansu yang dimulai pada tahun 1980an dan berlanjut hingga awal tahun 2000an. Intervensi pemerintah pusat diambil untuk menghentikan penurunan ekologi di Minqin, namun tekanan yang diberikan pemerintah provinsi kepada pejabat dan kader daerah untuk mencapai target yang mengikat, tidak mampu menyelesaikan permasalahan kompleks dan pada akhirnya justru tidak berhasil mewujudkan tujuan konservasi air yang berkelanjutan seperti yang dicita-citakan dalam rencana

restorasinya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan lingkungan hidup di China perlu mempertimbangkan interaksi kompleks dari beragam tujuan kelembagaan, program konservasi negara harus memasukkan mekanisme yang memprioritaskan praktik konsultasi lokal untuk memastikan dukungan kuat dari bawah ke atas (*bottom-up*) terhadap inisiatif kebijakan lingkungan tersebut.

Studi berikutnya dilakukan oleh Andrew Lepp dan Stephen Holland (2015) yang berjudul "*A Comparison of Attitudes Toward State-Led Conservation and Community-Based Conservation in the Village of Bigodi, Uganda*". Penelitian yang dilakukan di pedesaan di Uganda ini terkait dengan pengalaman penduduk desa terhadap dua jenis konservasi yang dilakukan di wilayahnya. Pertama, konservasi yang diprakarsai oleh negara dengan keterlibatan masyarakat lokal yang minimal. Kedua, konservasi yang dipimpin oleh anggota masyarakat dan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan sikap warga terhadap pendekatan konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara, dan untuk menjelaskan perbedaan sikap yang mungkin ada. Temuannya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat telah menghasilkan sikap positif terhadap konservasi berbanding terbalik dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara. Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa sikap negatif terhadap konservasi yang diprakarsai oleh negara akan menurunkan motivasi warga untuk berpartisipasi dalam konservasi dan justru mungkin mengarah pada perilaku anti konservasi. Fenomena tersebut telah terjadi di sekitar Taman Nasional Gunung Meru di Tanzania dan dijelaskan sebagai perlawanan petani terhadap ketidakadilan yang dirasakan dalam upaya konservasi yang dilakukan oleh negara.

Dari temuan-temuan studi-studi tersebut maka relevan untuk dilakukan kajian bentuk konservasi yang diprakarsai oleh negara di Indonesia yang dalam konteks disertasi ini kajian terhadap interaksi antara Taman Nasional Kelimutu dan masyarakat lokal disekitarnya dan bagaimana dampaknya.

2.3. Politik Bantuan Internasional dan Bantuan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

International Aid, kerap juga disebut dengan berbagai istilah. Salah satunya adalah Official Development Assistance (ODA) atau bantuan pembanguna resmi dimana sebuah negara memberikan bantuan kepada negara lain. Skema

mengalami sistem bantuan/donor internasional dari waktu ke waktu mengalami perubahan misalnya pada dekade 2000an seiring dengan hadirnya target-target pembangunan global yang dirumuskan negara-negara melalui berbagai pertemuan tingkat tinggi menghasilkan Millenium Development Goals kemudian dekade berikutnya melahirkan Sustainable Development Goals yang juga kemudian menjadi semacam pengarah dalam penyaluran bantuan-bantuan internasional, setiap bantuan internasional harus mengikuti arahan dari tujuan pembangunan global tersebut. Juga terjadi pergeseran dari isu pengurangan kemiskinan, demokratisasi dan ham sampai pada isu perubahan iklim.

Pada awal kemunculannya, pendonor dana bantuan internasional umumnya hanya didominasi oleh kelompok negara-negara barat utara. Kini tren tersebut juga semakin beragam dengan turut bermainnya negara-negara ekonomi baru seperti China, Brazil, India dan juga lembaga-lembaga donor swasta kecil serta *philantro-capitalist* (entitas-entitas yang terafiliasi dengan korporasi-korporasi multi nasional) muncul sebagai pendonor. Dari berbagai jenis bantuan luar negeri bantuan kemanusiaan adalah satu-satunya yang dianggap tidak bersifat politis, dimana bantuan ini disalurkan untuk mendukung pemulihan yang terjadi akibat bencana, kelaparan, epidemi atau hal-hal yang cenderung bersifat insidental. Model penyaluran maupun jenis bantuan dana donor internasional telah mengalami penyesuaian berdasarkan perkembangan situasi ekonomi politik global yang berlangsung dari waktu ke waktu. Setidaknya ada beberapa pandangan bagaimana melihat bantuan internasional kaitannya dengan mobilisasi sumber daya, dampak, dan hubungan antara negara pemberi dan penerima bantuan. Diskusi dan penyelidikan mengenai aktor, relasi kuasa dan kepentingan juga banyak melingkupi isu pembangunan internasional. Pandangan tersebut mengandung perdebatan dan kontroversi (McGillivray et al. 2006) yang terbagi atas tiga perspektif: ada yang melihat bantuan internasional dengan pandangan pesimis yang melihatnya hanya sebuah upaya membuang-buang sumber daya yang tidak memberikan dampak atau setidaknya dampak yang ditimbulkan tidak sebanding dengan sumber daya yang digelontorkan (Easterly, 2006; Moyo, 2009; Agarwal et al., 2011; Easterly & Williamson, 2011; Kosack, 2003; Ovaska, 2003). Pandangan berikutnya adalah pandangan yang lebih optimis yang melihat bantuan internasional akan memberikan dampak pengentasan kemiskinan di negara-negara penerima yang adalah negara-negara miskin di global south, afrika, asia tengah, selatan dan tenggara dan amerika latin (Hermanrud & Soysa, 2016;

Banerjee, 2007). Pandangan lain adalah pandangan yang melihat bantuan internasional menjadi semacam alat untuk mencengkeramkan hegemoni atau apparatus berebut pengaruh bagi negara-negara kaya utara atas negara miskin di global selatan yang sebenarnya memiliki banyak sumber daya alam (Corson, 2010; Corson, 2020; Cherlet, 2014; Dreher et al., 2009; Hameiri & Scrapello, 2018; Lewis, 2003; Tvedt, 2006), misalnya norwegia yang mengklaim diri dengan istilah “humanitarian superpower” (Hermanrud & Soysa, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Braaten dkk. (2018) dan Restivo, dkk. (2018) dengan menggunakan analisis regresi terhadap berbagai variabel yang menentukan bagaimana distribusi bantuan internasional sektor lingkungan ditemukan bahwa agensi-agensi (yang dalam konteks bilateral mewakili negaranya). Kerjasama bantuan internasional memiliki preferensi masing-masing dalam menentukan target negara penerima bantuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan sektor lingkungan dari negara donor ke negara penerima bantuan ternyata bukan hanya indikator tingkat persoalan lingkungan yang dihadapi oleh negara penerima (seperti tingkat degradasi lingkungan, tingkat deforestasi, tingkat kehilangan keanekaragaman hayati). Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemana penyaluran bantuan diarahkan. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah hubungan ekonomi (hubungan dagang) dan keamanan antara negara pemberi dengan negara penerima, kepemilikan sumberdaya alam, level demokrasi (tata Kelola pemerintahan, kebijakan, dll) di negara penerima, bahkan pada adanya hubungan Riwayat kolonialisme antara negara pemberi dan penerima. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata bantuan pembangunan internasional juga sangat terikat dengan politik ekonomi hubungan internasional, tidak sekadar persoalan lingkungan semata.

2.4. REDD+

REDD atau *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)* adalah kerangka penggunaan skema insentif keuangan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Konsep dan mekanisme REDD+ adalah pengembangan dari REDD, perubahan yang dilakukan untuk memperluas cakupan pengertian. Awalnya REDD semata untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ lalu dikembangkan untuk mengakomodasi konservasi hutan dan manajemen hutan pada tingkat global, nasional, dan sub-nasional. Skema REDD+ merupakan sebuah mekanisme insentif global bagi beberapa negara yang berkembang yang

mampu menjaga hutannya dari kerusakan lebih lanjut. Sehingga REDD+ mencakup usaha-usaha menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, memasukkan kegiatan konservasi hutan dan karbon, pengelolaan hutan secara lestari, dan peningkatan cadangan karbon. Ketentuan-ketentuan tersebut dimandatkan paragraf 70 keputusan COP 16 di Cancun tentang kontribusi setiap negara dalam aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan melalui aktivitas REDD+ sesuai dengan kemampuan dan kondisi nasional.

Skema REDD+ awalnya diusulkan oleh Papua Nugini dan Kosta Rika yang dalam skema sebelumnya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari skema perubahan iklim berdasarkan Protokol Kyoto yaitu *emission trading* atau ET dan *joint Implementation (JI)*. Skema JI hanya berlaku bagi dan di antara negara Annex 1. Sementara *clean development mechanism* atau CDM memang mencakup negara berkembang tetapi dibatasi tidak lebih dari 1% dari total yang bisa dikerjakan melalui proyek CDM di negara berkembang. Setelah diusulkan oleh Papua Nugini dan Kosta Rika lalu dirumuskan pada konferensi para pihak COP-13 Bali. Skema REDD+ diusulkan dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dengan memberikan kompensasi secara finansial kepada sejumlah negara berkembang untuk setiap capaian penurunan emisi dari menghentikan deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini disempurnakan pada COP 15 di Copenhagen, Denmark dengan menambahkan beberapa konsep untuk memasukkan pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), konservasi hutan dan karbon hutan, serta peningkatan stok karbon hutan. Kemudian lebih rinci dalam COP 19 Warsawa, merinci aspek-aspeknya di antaranya, pendanaan, koordinasi dan institusi, REL/RL, MRV, NFMS, *drivers of deforestation and degradation*, *safeguards*, dan sistem informasi *safeguards (SIS)*.

REDD+ di Indonesia meliputi hal-hal berikut: 1. Penurunan emisi dari deforestasi, 2. Penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut, 3. Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon melalui Konservasi hutan, Pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*), Rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak, dan 4. Penciptaan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan manfaat dari karbon melalui Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, Peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati, Peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain. Prinsip pelaksanaan REDD+ di Indonesia adalah efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel.

2.5. Ekologi Politik

Politik ekologi dengan penekanan politik ekonomi diperkenalkan dan mulai digunakan oleh Blaikie & Brookfield (1987) yang merintis pendekatan politik ekologi untuk mengidentifikasi alasan kegagalan pengelolaan lahan yang sangat bervariasi. Pendekatan ini pada awalnya hanya melingkupi pengetahuan tentang perubahan basis sumber daya, tindakan manusia untuk merespon, hingga perubahan dalam masyarakat yang melibatkan para pengolah lahan. Politik ekologi kemudian berkembang menjadi pendekatan yang digunakan dalam berbagai kajian lain seperti agraria, dan lingkungan dari sudut pandang politik ekonomi secara kritis (Bernstein, 1996; Byres 1995; Neuman, 2009).

Politik ekonomi jadi dasar yang penting untuk memahami politik ekologi, karena berhubungan langsung dengan tindakan manusia sebagai aktor baik secara individual maupun kolektif dalam menciptakan perubahan basis sumber daya. Karakteristik pembangunan yang menentukan arah perubahan lingkungan menuju kehancuran atau perbaikan sangat ditentukan oleh kondisi politik maupun ekonominya (Borras, 2009). Karena itu politik ekonomi dapat dipahami setelah kita mengidentifikasi tiga hal krusial yaitu akumulasi, kelas, dan negara (Byres, 1995). Akumulasi bukan sekedar kebiasaan menumpuk tapi soal perubahan mendasar dari praktik yang menciptakan surplus kelas mengacu pada struktur, hubungan, dan konflik, sementara negara mengacu pada kekuasaan yang mengatur dua hal di atas (Borras, 2009). Kajian politik ekologi dipicu oleh pandangan akan pentingnya melihat persoalan-persoalan ekologis dari sudut pandang politik ekonomi.

Kajian politik ekologi bisa ditelusuri ke berbagai bidang dan sub-disiplin. Kajiannya digunakan dan berkembang ke berbagai isu misalnya kajian politik ekologi feminis (Rocheleau, 1995) kajian politik ekologi terhadap perubahan iklim (Birkenholtz, 2011) kajian politik ekologi atas "*tourism*" (Mostafanezhad dkk, 2016). Oleh karena perkembangan tersebut, sampai saat ini kajian politik ekologi telah menyumbang kontribusi yang signifikan terhadap penggalan kritis atas persoalan-persoalan lingkungan dan agraria.

Untuk mengoperasionalkan perspektif politik ekologi, pendekatan "kehendak untuk memperbaiki" (Li, 2012) bisa didalami dan dipakai untuk mengkaji solusi lingkungan. Pendekatan tersebut dipakai oleh Tania Li untuk membedah proyek-proyek pembangunan yang dilakukan selama ini di Indonesia, bagaimana sejarahnya, bagaimana direncanakan, bagaimana dilaksanakan dan bagaimana

dampaknya bagi masyarakat, dan kaitannya dengan relasi kuasa dan kepentingan yang beroperasi dalam proyek-proyek pembangunan tersebut.

Konsep Tania Li “kehendak untuk memperbaiki” mengkaji proyek-proyek pembangunan di Indonesia secara kritis. Li melihat proyek-proyek pembangunan sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki yang dilakukan oleh “wali” masyarakat yang mengklaim diri merekalah yang paling paham bagaimana mengatur hidup masyarakat, apa yang dibutuhkan dan apa yang terbaik untuk masyarakat. Para wali masyarakat ini adalah para politisi, birokrasi, lembaga-lembaga donor internasional, para teknokrat, dan LSM-LSM. Pada dasarnya niat para wali ini bukanlah untuk menguasai tapi didorong oleh klaim bahwa merekalah yang paling mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masyarakat dan percaya cara tersebutlah yang benar. Dijelaskan juga oleh Li “bahwa untuk memperbaiki kehidupan masyarakat memerlukan rasionalitas yaitu upaya merumuskan jalan paling tepat untuk menata kehidupan manusia”.

Kedua, karakteristik yang disebut “mesin anti politik” (*anti-politic machine*) (Ferguson, 1996), yang dipinjam dari pemikiran James Ferguson atas proses pembangunan. Ferguson menjelaskan bahwa proses pembangunan adalah proses yang melepaskan isu politik ekonomi dari masalah-masalah yang terjadi. Sehingga menjadi persoalan apolitis, lebih lanjut proses tersebut menjadikan masalah hanya sekadar persoalan teknis (teknikalisasi). Pembangunan melihat masalah disederhanakan hanya menjadi persoalan teknis, (dari persoalan sistemik dimiskinkan - sisi politis - menjadi persoalan teknis kapasitas orang miskin yg bisa diperbaiki melalui proyek pembangunan –(teknikalisasi).

Pola seperti itu juga terjadi terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Persoalan lingkungan direduksi menjadi bukan persoalan politik-ekonomi, sehingga solusi-solusi lingkungan yang dipilih dan diterapkan menjadi hanya solusi teknis, misalnya ekowisata yang titik beratnya hanya pada peningkatan ekonomi dan penghidupan warga, bukan pada ketimpangan pengelolaan sumber daya atau eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam. Solusi yang diterapkan pada taraf tertentu bisa dilihat hanya obat penenang atau hanya untuk menarik hati pihak yang selama ini dirugikan secara langsung oleh kerusakan lingkungan.

Pengebirian dimensi politik-ekonomi dalam masalah-masalah dan solusi-solusi lingkungan pada gilirannya justru akan berdampak jangka panjang, misalnya tersingkirnya masyarakat tempatan dari pengelolaan wilayah ulayatnya,

contoh lain misalnya warga terjebak pada ekonomi pariwisata yang sangat rentan terhadap guncangan, misalnya pandemi covid-19.

Karakteristik yang ketiga, seperti lebih lanjut diurai Li, adalah upaya-upaya dari kehendak untuk memperbaiki ini sepertinya sengaja dirancang untuk mempertahankan *status quo*. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan tatanan yang ada. Misalnya proyek-proyek pembangunan dilaksanakan untuk menenangkan masyarakat agar tidak berontak. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melanggengkan apa yang sudah ada (sistem ekonomi global, konsumtivisme masyarakat modern, dan lain-lain).

2.6. Hegemoni dan Analisis Wacana

Antonio Gramsci, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Italia, lahir di Sardinia pada tahun 1891, ditangkap kemudian dipenjara pada tahun 1926 hingga akhirnya meninggal pada tahun 1937. Antonio Gramsci memberikan kontribusi penting dalam pemikiran Marxist, yaitu melalui teori hegemoni. Istilah hegemoni sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam wacana politik barat, dan secara tradisional diartikan sebagai dominasi dari satu pihak atas pihak lainnya (Bates:1975). Menurut Thomas R. Bates (1975) istilah hegemoni yang dipakai oleh Gramsci merujuk pada kosakata politik yang digunakan oleh kaum revolusioner Russia. Premis dasar dari teori hegemoni adalah "*one with which few would disagree: that man is not ruled by force alone, but also by ideas*" (Bates:1975, hal.351). Hal ini selaras dengan argumen Benedetto Fontana (1993) yang menyebutkan bahwa "*hegemony is defined by Gramsci as intellectual and moral leadership (direzione) whose principal constituting elements are consent and persuasion*" Selanjutnya juga disebutkan bahwa kemudian hegemoni dipahami sebagai alat dari kelas dominan untuk membangun sistem persetujuan yang permanen.

hegemony is thus conceived as the vehicle whereby the dominant social groups establish a system of "permanent consent" that legitimates a prevailing social order by encompassing a complex network of mutually reinforcing and interwoven ideas affirmed and articulated by intellectuals. (Fontana: 1993, hal.141)

Hegemoni dengan demikian dipahami sebagai wahana yang digunakan oleh kelompok-kelompok sosial dominan untuk membangun sistem "persetujuan permanen" yang melegitimasi tatanan sosial yang berlaku dengan mencakup jaringan kompleks ide-ide yang saling memperkuat dan terjalin yang ditegaskan dan diartikulasikan oleh para intelektual. (Fontana: 1993, hal.141)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata kunci dari hegemoni adalah *consent*. Berbicara mengenai *consent* (konsensus), secara spesifik Gramsci tidak melihat tipe dan macam konsensus apa yang secara determinan menentukan situasi hegemonis. Joseph Femia (1991, dalam Nezar Patria dan Andi Arief: 1999) memaparkan setidaknya ada empat model konsensus yang ada dalam perjalanan sejarah yaitu:

Pertama, dalam sejarah Romawi kuno. Di sini pusat kekuasaan ada di tangan kaisar, sehingga "konsensus" di sini terletak di tangan kaisar. Kedua, dalam sejarah pra modern, pandangan tentang konsensus di sini tampil sejalan dengan konsepsi masyarakat organik yang tampil dengan paham bahwa setiap orang mempunyai status dan fungsi yang ditentukan dalam hierarki alamiah (kodrat). Ketiga, dalam masyarakat kapitalis lanjut secara filosofis dan politik tampil teori-teori hukum alam dan kontrak sosial. Konsensus dipandang sebagai tindakan yang dikehendaki atau sekurang-kurangnya sukarela secara individual. Keempat, dalam pemikiran politik dewasa ini. Di sini ada perubahan pengertian konsensus dari pengertian liberal sebelumnya dan mengungkapkan tuntutan baru. Warga negara secara individual menuntut keterlibatan secara langsung ataupun tidak langsung dalam masyarakat politik yang diorganisasikan dan ditentukan. Karena itu dapat dikatakan bahwa konsep ini mengisi arti pokok yang tidak ada dalam pemikiran mengenai kontrak sosial. Konsensus dipandang sebagai kekhususan sifat dari sistem lembaga-lembaga demokratis yang familiar. (Arief dan Patria: 1999, hal. 120)

Berdasarkan hal tersebut, pelibatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk konsensus yang hendak dibangun untuk menciptakan relasi kuasa yang hegemonik antara masyarakat dengan negara, atau dengan NGO dan lembaga donor. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Gramsci mengenai praktik hegemoni, yaitu:

Hegemonic practices have a two fold end: first they aim at the constitution and consolidation of historical bloc. Second they seek the stabilisation of society around a project that not only expresses the fundamental interests of the dominant social group/(or groups), but also takes into account the interests of some of the subordinate groups. (Nally dan Schwarzmantel:2009)

Praktik hegemonik mempunyai dua tujuan: pertama, bertujuan untuk konstitusi dan konsolidasi blok sejarah. Kedua, mereka mengupayakan stabilisasi masyarakat di sekitar proyek yang tidak hanya mengungkapkan kepentingan fundamental kelompok/(banyak kelompok) sosial yang dominan, namun juga mempertimbangkan kepentingan beberapa kelompok bawahan. (Nally dan Schwarzmantel:2009)

Dengan demikian, praktik hegemoni, salah satu tujuan akhirnya adalah untuk mencari stabilitas dalam masyarakat terkait sebuah kepentingan tertentu.

Dalam konteks politik bantuan internasional, atau proyek-proyek pembangunan, stabilitas ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan proyek dan atau untuk mencapai kepentingan para lembaga donor.

Selain itu, teori Hegemoni Gramsci berhubungan dengan dua hal, yakni *means of coercion* dan *means of establishing hegemonic leadership*. *Means of coercion* berhubungan dengan alat atau tindakan kekerasan yang bersifat memaksa, atau yang bersifat *law enforcement*. Sedangkan *means of establishing hegemonic leadership* merupakan perangkat yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranatanya untuk patuh kepada mereka yang berkuasa melalui institusi pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Alat kekerasan terdiri dari alat-alat paksa dan represi negara, sementara alat pemilikan kepemimpinan hegemonis merujuk pada institusi dalam formasi sosial yang bukan bagian dalam proses produksi ekonomi material juga bukan menjadi bagian dari organisasi negara (Patria dan Arief: 1999).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hegemoni adalah kepatuhan secara sadar atas kuasa sebuah entitas. Kuasa yang dibangun adalah bukan kuasa melalui paksaan atau tindak kekerasan, melainkan kontrol. Hegemoni sendiri lahir dari adanya praktik persetujuan atau menundukkan. Jika suatu kelompok ingin memperoleh kontrol dalam persetujuan, maka kelompok tersebut harus bisa membangun kekuatan sosial lalu memperjuangkan gagasan mereka agar menjadi sebuah pandangan yang diterima secara universal.

Pemikiran Gramsci tentang teori Hegemoni kemudian menjadi inspirasi dalam pemikiran-pemikiran selanjutnya, di antaranya adalah Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe yang merupakan penganut pos marxisme. Meskipun berpijak pada teori hegemoni Gramsci, Laclau dan Mouffe memiliki perbedaan dengan pemikiran Gramsci dalam melakukan analisa terhadap kepolitikan, dimana Gramsci memijakkan paradigma teoritiknya pada analisa kelas, sementara Laclau dan Mouffe memijakkan paradigma teoritiknya pada analisa diskursus (*discourse analysis*) (Hutagalung:2008). Teori ini menelaah bagaimana praktik-praktik sosial mengartikulasikan dan mengkontestasikan diskursus-diskursus yang membentuk realitas sosial. Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe (2001) menjelaskan diskursus sebagai "*The structured totality resulting from the articulatory practice*"

Menurut Laclau dan Mouffe (2001), hegemoni menekankan cara-cara di mana kekuasaan beroperasi untuk membentuk pemahaman hubungan sosial kita sehari-hari, dan untuk mengatur cara-cara di mana kita setuju untuk (dan

mereproduksi) hubungan kekuasaan secara terselubung. Lebih lanjut Laclau dan Mouffe menjelaskan bahwa terkait dengan kelas-kelas “yang dieksploitasi”, terdapat bentuk subordinasi lain di luar bidang ekonomi. Subordinasi dapat bersifat politis, sosial, atau budaya.

Dengan menggabungkan teori hegemoni Gramsci ditambah analisa diskursus Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, studi ini juga akan melakukan analisis wacana kritis dalam proyek-proyek solusi lingkungan di Indonesia. Analisis wacana kritis (CDA) menelisik hubungan kekuasaan dalam teks dan konteks (Van Dijk, 2004: 352). Analisis wacana kritis bisa menjadi alat yang ampuh dalam menyelidiki konstruksi bahasa yang menghasilkan relasi kuasa yang asimetris antara aktor. Metode ini berakar pada teori sosial kritis, yang bisa ditarik sampai ke pemikir-pemikir seperti Foucault, Bourdieu, Gramsci, Althusser dan Mazhab Frankfurt (Luke, 2002).

Selain konsep-konsep dalam tradisi foucauldian, konsep-konsep Gramscian dalam hal ini konsep hegemoni, juga dirujuk saat meletakkan landasan teoretis terhadap CDA (Fairclough, 2004, 2013), mereka yang mengambil inspirasi dari Gramsci dalam banyak kasus hanya memberikan sedikit rincian. Keterlibatan konsep hegemoni Gramsci memperkuat analisis atas hubungan sosial dan wacana. Pemahaman atas hegemoni, pemaksaan dan persetujuan, hanya dapat dicapai melalui keterlibatan kacamata Gramsci. Dalam konteks Analisis Wacana Kritis kacamata Gramsci bisa memperdalam pemahaman kita atas apa yang menggerakkan hegemoni dan gagasan akal sehat sebagai elemen utama dari hegemoni. Bahwa wacana sebagai alat dominasi sosial dan politik bisa ditelisik dari kacamata Gramsci. Di sisi lain analisis wacana bisa memberikan kerangka kritis menganalisis asumsi ideologis yang melekat dalam keputusan politik dan kebijakan serta dampaknya.